

Readiness for Implementing Activity-Based Costing in Determining Production Costs and Cost Efficiency among Food Processing MSMEs in Bekasi City

Fitri Andrijani¹⁾, Ependi ^{2*)}, Lily Nabilah³⁾

¹⁾²⁾³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mohammad Husni Thamrin

^{*)}Correspondence author: Ependi, ependi@thamrin.ac.id, Bandung, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v7i2.3959>

Abstract

This study aims to analyze the application of Activity-Based Costing (ABC) in determining the cost of production (HPP) for food-processing MSMEs in Bekasi City. MSMEs play an important role in Indonesia's economy but still face challenges in achieving accurate HPP due to conventional costing methods that often produce cost distortions. ABC is chosen because it allocates costs based on actual activities consuming resources, thus providing more accurate and relevant cost information. This research employs a contextual qualitative approach by exploring the experiences of MSME actors in implementing ABC, including human factors, work culture, and resource limitations. The focus is not only on HPP accuracy but also on the impact of ABC on cost efficiency and pricing strategies. The findings are expected to show that ABC enhances MSME competitiveness through more realistic cost calculations, control of non-value-added activities, and competitive pricing. The novelty of this study lies in developing a conceptual ABC model relevant to Indonesian MSMEs, as well as integrating simple digital accounting technology to support sustainable implementation. Therefore, this research contributes to strengthening MSME cost systems and provides a basis for policies and managerial accounting training in the small business sector.

Keywords: Activity-Based Costing, Cost of Production, Cost Efficiency, MSMEs, Management Accounting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Activity-Based Costing* (ABC) dalam penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) bagi UMKM pengolahan makanan di Kota Bekasi. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia namun masih menghadapi tantangan dalam memperoleh perhitungan HPP yang akurat akibat penggunaan metode penentuan biaya konvensional yang sering kali menimbulkan distorsi biaya. Metode ABC dipilih karena mampu mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas aktual yang mengonsumsi sumber daya, sehingga menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat dan relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kontekstual dengan mengeksplorasi pengalaman pelaku UMKM dalam menerapkan ABC, termasuk aspek faktor manusia, budaya kerja, dan keterbatasan sumber daya. Fokus penelitian tidak hanya terletak pada akurasi HPP, tetapi juga pada dampak penerapan ABC terhadap efisiensi biaya dan strategi penetapan harga. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa ABC dapat meningkatkan daya saing UMKM melalui perhitungan biaya yang lebih realistis, pengendalian aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, serta penetapan harga yang kompetitif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual ABC yang relevan bagi UMKM di Indonesia, serta integrasi teknologi akuntansi digital sederhana untuk mendukung keberlanjutan penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat sistem biaya UMKM serta memberikan landasan bagi perumusan kebijakan dan pelatihan akuntansi manajerial di sektor usaha kecil.

Kata Kunci: Activity-Based Costing, Biaya Produksi, Efisiensi Biaya, UKM, Akuntansi Manajemen

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pada sektor pengolahan makanan. Perkembangan usaha kuliner yang semakin beragam menyebabkan pelaku UMKM tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, tetapi juga mampu mengendalikan biaya produksi dan menentukan harga jual secara tepat. Dalam kondisi persaingan yang semakin tinggi, informasi biaya menjadi salah satu dasar penting bagi pelaku usaha dalam menentukan harga, mengendalikan biaya, mengevaluasi keuntungan, dan mengambil keputusan manajerial. Gunasekaran, Marri, dan Grieve (1999) menjelaskan bahwa pengelolaan biaya menjadi semakin penting bagi usaha kecil dan menengah karena berkaitan dengan peningkatan kinerja dan daya saing usaha.

Salah satu persoalan yang masih dihadapi UMKM adalah keterbatasan dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan biaya secara sistematis. Pencatatan yang sederhana menyebabkan sebagian pelaku usaha belum mampu memisahkan biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead produksi, dan biaya operasional lainnya secara memadai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan informasi mengenai Harga Pokok Produksi (HPP) menjadi kurang akurat. Penelitian Syamsul (2024) menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi permasalahan dalam penerapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang lengkap. Pencatatan keuangan pada UMKM umumnya dilakukan untuk mengetahui persediaan, pendapatan, omzet, modal, laba/rugi, dan kinerja usaha, tetapi belum seluruhnya dilakukan secara sistematis berdasarkan kebutuhan informasi akuntansi manajerial.

Permasalahan tersebut juga relevan dengan kondisi empiris penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima UMKM pengolahan makanan di Kota Bekasi, ditemukan bahwa sebagian pelaku usaha masih menggunakan pencatatan biaya secara sederhana atau konvensional. Bahkan, pada beberapa usaha masih terdapat pencampuran antara biaya usaha dengan kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya, terdapat UMKM yang telah menggunakan pencatatan biaya yang lebih terstruktur. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan biaya antar-UMKM tidak seragam.

Secara teoritis, Harga Pokok Produksi (HPP) merupakan informasi penting dalam sistem akuntansi biaya karena menggambarkan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan produk. Carter dan Usry (2002) menjelaskan bahwa harga pokok produksi mencakup biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Mulyadi (2005) juga menjelaskan bahwa harga pokok produksi merupakan seluruh

biaya yang dikorbankan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Sementara itu, Hansen dan Mowen (2007) menempatkan HPP sebagai bagian dari sistem akuntansi biaya yang dapat digunakan untuk menilai biaya produksi, mengendalikan biaya, mengevaluasi efisiensi, dan mendukung penentuan harga. Dalam konteks penelitian ini, ketepatan pengidentifikasian ketiga komponen biaya tersebut menjadi penting karena kesalahan dalam menghitung HPP dapat menyebabkan informasi biaya yang digunakan dalam penentuan harga jual menjadi kurang tepat.

Dalam perkembangan akuntansi manajemen, pendekatan tradisional dalam pembebanan biaya overhead memiliki keterbatasan ketika struktur biaya produksi semakin kompleks. Activity-Based Costing (ABC) dikembangkan sebagai pendekatan yang menempatkan aktivitas sebagai dasar pembebanan biaya. Cooper dan Kaplan (1988) menjelaskan bahwa informasi biaya yang terdistorsi dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait harga, bauran produk, dan proses produksi. ABC memberikan alternatif dengan menelusuri biaya melalui aktivitas yang mengonsumsi sumber daya sehingga biaya produk dapat dihitung secara lebih representatif.

Secara konseptual, Cooper dan Kaplan (1988) menjelaskan bahwa ABC menghubungkan sumber daya, aktivitas, dan objek biaya. Biaya sumber daya terlebih dahulu ditelusuri ke aktivitas, kemudian biaya aktivitas dialokasikan kepada produk berdasarkan cost driver yang mencerminkan konsumsi aktivitas. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam pembahasan sistem biaya berbasis aktivitas oleh Cooper dan Kaplan (1992), yang menekankan pentingnya pengukuran penggunaan sumber daya dalam sistem biaya berbasis aktivitas. Dengan demikian, ABC tidak hanya berfokus pada berapa banyak produk yang dihasilkan, tetapi juga pada aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya.

Dalam konteks UMKM pengolahan makanan, aktivitas produksi dapat meliputi pembelian bahan baku, persiapan bahan, proses produksi, penggunaan mesin, pemeriksaan kualitas, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Masing-masing aktivitas dapat menggunakan sumber daya dalam tingkat yang berbeda sehingga penggunaan satu dasar pembebanan biaya untuk seluruh produk berpotensi menghasilkan distorsi. Misalnya, biaya listrik dapat dikaitkan dengan jam penggunaan mesin, biaya inspeksi dengan jumlah pemeriksaan atau batch, sedangkan biaya pengemasan dapat dikaitkan dengan jumlah unit yang dikemas. Pendekatan tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi biaya yang lebih terperinci. Konsep ini sesuai dengan penjelasan Cooper dan Kaplan (1988) serta Kaplan dan Cooper (1992) mengenai hubungan antara aktivitas, konsumsi sumber daya, dan objek biaya.

Relevansi ABC terhadap UMKM juga telah dibahas dalam penelitian terdahulu. Gunasekaran et al. (1999) menunjukkan bahwa ABC memiliki potensi untuk diterapkan pada usaha kecil dan menengah karena dapat memberikan kerangka pengelolaan biaya yang lebih baik dan mendukung peningkatan daya saing. Penelitian tersebut secara khusus mengembangkan kerangka penerapan ABC pada SMEs dan menunjukkan bahwa penerapan ABC pada perusahaan kecil perlu mempertimbangkan karakteristik serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Penelitian Jänkälä dan Silvola (2012) juga memberikan bukti empiris bahwa penggunaan ABC pada perusahaan kecil berkaitan dengan perkembangan kinerja perusahaan. Studi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan kecil dengan sumber daya keuangan yang memadai lebih memungkinkan menggunakan ABC, sementara penggunaan ABC dikaitkan dengan perkembangan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan pada periode berikutnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ABC tidak hanya dapat dipandang sebagai teknik perhitungan biaya, tetapi juga sebagai bagian dari sistem informasi manajemen untuk mendukung keputusan bisnis.

Namun demikian, penerapan ABC pada UMKM tidak selalu mudah. Ahmad, Teng, dan Zabri (2017), dalam penelitian terhadap 108 SMEs manufaktur di Malaysia, menemukan bahwa hanya sebagian kecil responden yang telah menerapkan ABC. Hambatan yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya, kurangnya keahlian, biaya penerapan, kompleksitas sistem, kesulitan dalam pengumpulan data cost driver, serta kesulitan menentukan cost driver yang tepat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan ABC tidak hanya ditentukan oleh keunggulan teknis metode, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan kemampuan sumber daya manusia.

Persoalan kesiapan tersebut semakin relevan dalam konteks usaha keluarga dan UMKM. Tandiono (2024), melalui studi kasus pada bisnis keluarga di Indonesia, menemukan bahwa penerapan ABC dapat menghadapi hambatan teknis, organisasional, dan kultural. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan data aktivitas, variasi aktivitas operasional, persepsi pemilik usaha, keterbatasan sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan. Temuan tersebut memberikan dasar bahwa kajian mengenai ABC pada UMKM perlu melihat bukan hanya hasil perhitungan biaya, tetapi juga kesiapan dan hambatan adopsi metode tersebut.

Dalam konteks Indonesia, penelitian terbaru juga menunjukkan manfaat ABC dalam penentuan HPP UMKM. Turnip et al. (2024) menerapkan ABC pada UMKM Basreng Emak Dyah di Pematangsiantar dengan mengidentifikasi aktivitas produksi, menentukan cost

driver, dan menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ABC memberikan informasi biaya produksi yang lebih terperinci dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga jual. Sementara itu, Anggreini et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan ABC pada UMKM Tempe Kembar dapat membantu mengidentifikasi kontribusi aktivitas terhadap total biaya produksi serta memberikan informasi untuk mengidentifikasi aktivitas yang memiliki biaya tinggi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pranoto dan Amiluddin mengenai Activity-Based Costing System untuk penetapan Harga Pokok Produksi produk UMKM. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu persoalan UMKM adalah belum optimalnya pencatatan biaya sehingga informasi HPP menjadi kurang akurat, sedangkan ABC dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai biaya yang digunakan dalam proses produksi secara lebih terstruktur. Penelitian mengenai UMKM sektor pangan juga menunjukkan bahwa ketidaklengkapan komponen biaya dapat menyebabkan HPP yang dihitung oleh usaha lebih rendah daripada biaya aktual. Setiawan et al. (2024), misalnya, menemukan bahwa tidak dimasukkannya biaya tenaga kerja langsung dalam perhitungan UMKM menyebabkan HPP menjadi lebih rendah dibandingkan ketika seluruh komponen biaya produksi diperhitungkan.

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak membahas penggunaan ABC untuk menghitung HPP dan menentukan harga jual, sebagian penelitian lebih banyak menggunakan pendekatan studi kasus kuantitatif pada satu UMKM dan langsung menghitung kembali HPP dengan metode ABC. Penelitian Turnip et al. (2024) dan Anggreini et al. (2024), misalnya, berfokus pada penerapan ABC untuk menghasilkan perhitungan biaya pada satu objek UMKM. Sementara itu, penelitian mengenai kesiapan dan hambatan adopsi ABC pada UMKM masih relatif membutuhkan penguatan, khususnya pada konteks UMKM pengolahan makanan dengan karakteristik usaha yang berbeda-beda. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian untuk memahami bagaimana kondisi pencatatan biaya yang sebenarnya, bagaimana pelaku usaha menentukan harga, sejauh mana mereka memahami ABC, serta faktor apa saja yang menjadi hambatan sebelum ABC dapat diterapkan.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap lima UMKM pengolahan makanan di Kota Bekasi, yaitu Tekwan Bu Yaya, Kriuk Chicken, Kue Lumpur Dzikra, Bakmi Ayam Favorit, dan Roti Lestari. Kelima UMKM tersebut memiliki karakteristik produksi dan pengelolaan usaha yang berbeda. Tekwan Bu Yaya menjalankan produksi berbasis keluarga, Kriuk Chicken menggunakan sistem

franchise dan SOP, Kue Lumpur Dzikra mempertahankan proses produksi tradisional, Bakmi Ayam Favorit dikelola secara sederhana bersama keluarga, sedangkan Roti Lestari memiliki proses bakery yang relatif lebih sistematis. Keragaman tersebut memberikan peluang untuk melihat bagaimana karakteristik usaha berkaitan dengan pencatatan biaya dan kesiapan terhadap metode ABC.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak satu pun dari lima UMKM tersebut telah menerapkan Activity-Based Costing. Sebagian UMKM masih menggunakan pencatatan biaya sederhana, sedangkan sebagian lainnya telah memiliki pencatatan yang lebih terstruktur. Perbedaan juga terlihat dalam penentuan harga jual, yang dipengaruhi oleh biaya bahan baku, kondisi pasar, pengalaman pemilik, standar franchise, serta perhitungan HPP sederhana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan metode ABC, tetapi juga kesiapan dasar untuk mengadopsinya, seperti kemampuan mencatat biaya, memisahkan biaya usaha dan rumah tangga, mengidentifikasi aktivitas produksi, menentukan cost driver, serta memiliki sumber daya manusia yang memahami akuntansi biaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang ABC sebagai metode yang potensial untuk mendukung peningkatan akurasi HPP, efisiensi biaya, dan pengambilan keputusan manajerial, bukan sebagai metode yang telah berhasil diterapkan pada kelima UMKM. Perspektif tersebut penting agar interpretasi hasil penelitian tidak melebihi bukti empiris yang diperoleh. Penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk menjawab bagaimana kondisi pencatatan biaya dan penentuan harga jual pada UMKM pengolahan makanan, bagaimana tingkat kesiapan UMKM dalam mengadopsi ABC, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana potensi ABC dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan biaya dan keputusan manajerial.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola pencatatan biaya dan penentuan harga jual pada UMKM pengolahan makanan, mengidentifikasi kesiapan dan hambatan penerapan Activity-Based Costing, serta menganalisis potensi ABC dalam meningkatkan akurasi Harga Pokok Produksi dan mendukung efisiensi biaya serta pengambilan keputusan manajerial pada UMKM pengolahan makanan di Kota Bekasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis sistem pencatatan biaya, penentuan Harga Pokok Produksi (HPP), strategi penetapan harga, dan

kesiapan UMKM dalam mengadopsi Activity-Based Costing (ABC). Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses produksi, pencatatan biaya, dan penetapan harga. Penelitian melibatkan lima UMKM pengolahan makanan, yaitu Tekwan Bu Yaya, Kriuk Chicken, Kue Lumpur Dzikra, Bakmi Ayam Favorit, dan Roti Lestari. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dikategorikan berdasarkan karakteristik produksi, pencatatan biaya, HPP, strategi harga, dan kesiapan ABC. NVivo Matrix Coding digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi pola antar-tema pada kelima UMKM. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, konsistensi data, data saturation, audit trail, dan peer debriefing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Pola Pengelolaan Lima UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima UMKM pengolahan makanan memiliki karakteristik usaha dan proses produksi yang berbeda. Tekwan Bu Yaya, Kue Lumpur Dzikra, dan Bakmi Ayam Favorit masih dikelola secara sederhana dan berbasis keluarga, sedangkan Kriuk Chicken menggunakan sistem franchise dengan SOP yang relatif terstandar. Roti Lestari memiliki proses produksi yang lebih sistematis, meliputi mixing, proofing, baking, dan packaging. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam kompleksitas aktivitas dan kebutuhan informasi biaya pada masing-masing UMKM.

Temuan ini sejalan dengan Gunasekaran et al. (1999) yang menjelaskan bahwa karakteristik dan struktur usaha kecil yang beragam menyebabkan kebutuhan pengelolaan biaya berbeda antarperusahaan. Dalam konteks ABC, perbedaan aktivitas tersebut penting karena biaya overhead sebaiknya dialokasikan berdasarkan aktivitas dan cost driver yang mencerminkan konsumsi sumber daya. Hasil penelitian juga sejalan dengan Turnip et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan ABC pada UMKM perlu diawali dengan identifikasi aktivitas produksi dan cost driver. Dengan pendekatan tersebut, biaya dapat ditelusuri berdasarkan aktivitas yang benar-benar menggunakan sumber daya. Penelitian Pranoto dan Amiluddin (2024) serta Dipya dan Martadinata (2024) juga menunjukkan bahwa pencatatan biaya yang sederhana dapat menyebabkan ketidakakuratan HPP karena belum seluruh biaya produksi dan overhead diperhitungkan secara memadai.

Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap ABC tidak hanya ditentukan oleh kompleksitas produksi. Bahkan UMKM dengan proses produksi relatif sederhana tetap dapat membutuhkan ABC apabila pencatatan konvensional belum mampu menggambarkan konsumsi sumber daya secara tepat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa ABC perlu mempertimbangkan aktivitas, struktur biaya, dan pola konsumsi sumber daya, bukan hanya jumlah produk yang dihasilkan. Dalam konteks lima UMKM yang diteliti, Roti Lestari dan Kriuk Chicken memiliki sistem operasional yang relatif lebih terstruktur, sedangkan tiga UMKM lainnya masih menggunakan pengelolaan sederhana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan penerapan ABC berbeda antar-UMKM. Kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kompleksitas produksi, tetapi juga dengan kemampuan pencatatan biaya, ketersediaan data, pemahaman akuntansi biaya, serta kemampuan mengidentifikasi aktivitas dan cost driver. Hal ini sejalan dengan Tandiono (2024) yang menunjukkan bahwa adopsi ABC pada usaha kecil dan keluarga juga dipengaruhi oleh faktor organisasional dan kesiapan pemilik usaha.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik usaha dan aktivitas produksi merupakan faktor penting dalam menentukan kebutuhan informasi biaya dan kesiapan adopsi ABC. Semakin beragam aktivitas dan penggunaan sumber daya, semakin diperlukan informasi biaya yang lebih terperinci. Namun, pada UMKM dengan aktivitas sederhana sekalipun, ABC tetap berpotensi digunakan apabila sistem pencatatan konvensional belum mampu menghasilkan informasi HPP yang memadai.

Tabel 1. Karakteristik Usaha dan Kompleksitas Aktivitas Produksi UMKM

UMKM	Karakteristik Usaha	Sistem Produksi	Pencatatan Biaya	Kompleksitas Aktivitas
Tekwan Bu Yaya	Usaha keluarga/tradisional	Produksi sederhana berbasis pesanan	Sederhana dan belum terstruktur	Rendah
Kriuk Chicken	Usaha franchise	Mengikuti SOP franchise	Relatif terstruktur	Sedang
Kue Lumpur Dzikra	Usaha keluarga/tradisional	Produksi tradisional	Sederhana dan sebagian bercampur dengan kebutuhan rumah tangga	Rendah–sedang
Bakmi Ayam Favorit	Usaha keluarga/semi-tradisional	Produksi langsung untuk pasar lokal	Sederhana	Sedang
Roti Lestari	Usaha bakery modern	Menggunakan mesin dan proses produksi lebih terstruktur	Terstruktur, menggunakan perhitungan HPP	Tinggi

Sumber: Data primer penelitian, diolah melalui NVivo Matrix Coding

Pencatatan Biaya Masih Didominasi Pendekatan Tradisional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan biaya pada lima UMKM masih didominasi pendekatan sederhana dan tradisional. Tekwan Bu Yaya, Kue Lumpur Dzikra, dan Bakmi Ayam Favorit menggunakan pencatatan yang belum terstruktur, sedangkan Kriuk Chicken dan Roti Lestari telah memiliki pencatatan yang relatif lebih sistematis. Namun, tidak satu pun dari lima UMKM telah menerapkan Activity-Based Costing (ABC) secara aktual.

Tabel 2. Kondisi Pencatatan Biaya pada UMKM

UMKM	Pencatatan Biaya	Dasar Perhitungan HPP/Harga	Penerapan ABC
Tekwan Bu Yaya	Sederhana	Pengalaman dan biaya bahan	Belum diterapkan
Kriuk Chicken	Relatif terstruktur	Ketentuan franchise/SOP	Belum diterapkan
Kue Lumpur Dzikra	Sederhana	Biaya dan kondisi pasar	Belum diterapkan
Bakmi Ayam Favorit	Sederhana	Biaya dan harga pasar	Belum diterapkan
Roti Lestari	Terstruktur	HPP dan margin	Belum diterapkan

Sumber: Data primer penelitian, diolah melalui NVivo Matrix Coding.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum memisahkan dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas produksi secara rinci. Padahal, dalam konsep ABC, biaya overhead dialokasikan berdasarkan aktivitas dan cost driver yang mencerminkan penggunaan sumber daya. Turnip et al. (2024) menegaskan bahwa penerapan ABC perlu diawali dengan identifikasi aktivitas dan cost driver. Dengan demikian, pencatatan biaya yang lebih terstruktur menjadi dasar penting untuk menghasilkan informasi HPP yang lebih akurat. Temuan ini juga sejalan dengan Pranoto dan Amiluddin (2024) serta Dipya dan Martadinata (2024) yang menunjukkan bahwa pencatatan biaya yang sederhana dapat menyebabkan sebagian biaya produksi dan overhead belum diperhitungkan secara memadai. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut terutama terlihat pada UMKM yang masih mengandalkan pengalaman pemilik dan pencatatan sederhana dalam menentukan biaya dan harga.

Meskipun demikian, tingkat kesiapan setiap UMKM berbeda. Kriuk Chicken dan Roti Lestari memiliki sistem pencatatan yang lebih terstruktur sehingga secara administratif memiliki dasar yang lebih memadai untuk mengembangkan pencatatan berbasis aktivitas. Sebaliknya, tiga UMKM lainnya masih memerlukan penguatan dalam pemisahan biaya usaha, pencatatan aktivitas, dan pemahaman akuntansi biaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan ABC perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing UMKM. Dengan demikian, permasalahan utama bukan semata-mata tidak digunakannya metode ABC, tetapi belum tersedianya sistem pencatatan biaya yang memadai sebagai dasar penerapan ABC. Oleh karena itu, penguatan pencatatan biaya,

identifikasi aktivitas, dan penentuan cost driver menjadi langkah awal sebelum ABC dapat diterapkan secara efektif pada UMKM pengolahan makanan.

Strategi Penetapan Harga Masih Beragam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penetapan harga pada lima UMKM masih beragam dan belum seluruhnya didasarkan pada informasi biaya yang komprehensif. Tekwan Bu Yaya mempertahankan harga Rp50.000 per bungkus sejak 2013 dengan menyesuaikan isi produk. Kriuk Chicken menggunakan formula harga berdasarkan modal dan SOP franchise. Kue Lumpur Dzikra menyesuaikan harga dengan kondisi pasar, sedangkan Bakmi Ayam Favorit menetapkan harga sedikit di bawah harga pasar. Sementara itu, Roti Lestari menggunakan perhitungan HPP berdasarkan biaya bahan, tenaga kerja, dan kemasan sebelum menambahkan margin.

Tabel 3. Strategi Penetapan Harga pada Lima UMKM

UMKM	Dasar Penetapan Harga	Karakteristik Strategi
Tekwan Bu Yaya	Harga historis dan penyesuaian isi	Mempertahankan harga
Kriuk Chicken	Modal dan SOP franchise	Formula standar
Kue Lumpur Dzikra	Kondisi dan harga pasar	Berorientasi pasar
Bakmi Ayam Favorit	Harga pasar dan lokasi usaha	Sedikit di bawah pasar
UMKM	Dasar Penetapan Harga	Karakteristik Strategi

Sumber: Data primer penelitian, diolah melalui NVivo Matrix Coding.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan harga tidak hanya dipengaruhi oleh biaya produksi, tetapi juga oleh harga pesaing, kondisi pasar, pengalaman pemilik, lokasi usaha, dan daya beli konsumen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas informasi biaya yang digunakan dalam penetapan harga juga berbeda antar-UMKM. Roti Lestari, misalnya, telah menggunakan HPP sebagai dasar penetapan harga, sedangkan beberapa UMKM lainnya masih lebih banyak menggunakan pertimbangan pasar dan pengalaman usaha. Dalam konteks ini, Activity-Based Costing (ABC) berpotensi memberikan informasi biaya yang lebih rinci dengan menghubungkan biaya overhead dengan aktivitas dan cost driver. Informasi tersebut dapat membantu UMKM mengidentifikasi biaya yang digunakan dalam proses produksi sehingga perhitungan HPP dan margin dapat dilakukan secara lebih informatif.

Dengan demikian, strategi penetapan harga pada kelima UMKM menunjukkan adanya perbedaan tingkat penggunaan informasi biaya. UMKM yang telah menggunakan HPP memiliki dasar biaya yang lebih terstruktur, sedangkan UMKM yang mengandalkan harga pasar atau pengalaman masih memerlukan penguatan pencatatan biaya. ABC dapat dipertimbangkan sebagai pendekatan lanjutan untuk mendukung penentuan HPP dan harga

jual, terutama apabila sistem pencatatan yang ada belum mampu menggambarkan konsumsi sumber daya secara memadai.

Belum Ada UMKM yang Menerapkan Activity-Based Costing

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa tidak satu pun dari lima UMKM telah menerapkan Activity-Based Costing (ABC). Seluruh UMKM masih menggunakan pencatatan biaya dan penetapan harga secara sederhana atau tradisional. Kondisi ini menunjukkan bahwa ABC pada objek penelitian masih berada pada tahap peluang dan kebutuhan adopsi, bukan implementasi aktual.

Tabel 4. Kondisi Penerapan ABC pada Lima UMKM

UMKM	Kondisi Pencatatan Biaya	Penerapan ABC	Potensi Pengembangan
Tekwan Bu Yaya	Sederhana	Belum diterapkan	Identifikasi aktivitas dasar
Kriuk Chicken	Relatif terstruktur	Belum diterapkan	Pengembangan cost driver
Kue Lumpur Dzikra	Sederhana	Belum diterapkan	Pemisahan dan pengelompokan biaya
Bakmi Ayam Favorit	Sederhana	Belum diterapkan	Identifikasi aktivitas produksi
Roti Lestari	Terstruktur	Belum diterapkan	Integrasi HPP dengan ABC

Sumber: Data primer penelitian, diolah melalui NVivo Matrix Coding.

Meskipun ABC belum diterapkan, aktivitas produksi yang ditemukan menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan pencatatan berbasis aktivitas. Aktivitas seperti pembelian bahan baku, pengolahan, penggunaan tenaga kerja dan mesin, pengemasan, distribusi, serta produksi per batch dapat digunakan sebagai dasar identifikasi cost pool dan cost driver.

Tabel 5. Aktivitas dan Potensi Cost Driver pada UMKM

Aktivitas	Potensi Cost Driver
Pembelian bahan baku	Jumlah pembelian/pesanan
Pengolahan	Jam kerja
Penggunaan listrik/mesin	KWh atau jam mesin
Pengemasan	Jumlah unit/kemasan
Distribusi	Jumlah pengiriman atau jarak
Produksi per batch	Jumlah batch

Sumber: Data primer penelitian dan pengembangan analisis berdasarkan aktivitas produksi.

Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ABC dapat dimulai dari aktivitas yang paling mudah diidentifikasi dan dicatat. UMKM tidak harus langsung menggunakan sistem ABC yang kompleks, tetapi dapat memulainya dengan memisahkan biaya berdasarkan aktivitas utama dan menentukan cost driver yang sesuai. Pendekatan ini relevan bagi UMKM karena keterbatasan sumber daya, kemampuan akuntansi, dan ketersediaan data menjadi pertimbangan dalam penerapan sistem biaya.

Dengan demikian, ABC dalam penelitian ini lebih tepat diposisikan sebagai pendekatan yang berpotensi mendukung peningkatan akurasi HPP dan kualitas informasi biaya, bukan sebagai metode yang telah terbukti meningkatkan efisiensi atau laba. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa langkah awal penerapan ABC pada UMKM adalah memperkuat pencatatan biaya, mengidentifikasi aktivitas, menentukan cost driver, dan meningkatkan pemahaman akuntansi biaya. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi penerapan ABC secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing UMKM.

Perbedaan UMKM Tradisional dan Modern

Hasil Matrix Coding NVivo menunjukkan adanya perbedaan antara UMKM tradisional dan UMKM yang memiliki sistem operasional lebih terstruktur. Tekwan Bu Yaya, Kue Lumpur Dzikra, dan Bakmi Ayam Favorit cenderung memiliki pencatatan biaya yang sederhana, proses produksi berbasis keluarga, dan fleksibilitas dalam menetapkan harga. Sementara itu, Kriuk Chicken dan Roti Lestari memiliki pencatatan biaya yang lebih terstruktur dan proses produksi yang lebih sistematis.

Tabel 6. Perbandingan Karakteristik UMKM Tradisional dan Modern/Franchise

Aspek	UMKM Tradisional	UMKM Modern/Franchise
UMKM	Tekwan Bu Yaya, Kue Lumpur Dzikra, Bakmi Ayam Favorit	Kriuk Chicken, Roti Lestari
Pengelolaan	Berbasis keluarga	Lebih terstruktur
Pencatatan biaya	Sederhana	Relatif terstruktur
Proses produksi	Sederhana dan fleksibel	Lebih sistematis
Penetapan harga	Pengalaman dan kondisi pasar	SOP/HPP dan margin
Kesiapan menuju ABC	Memerlukan penguatan dasar	Relatif lebih siap

Sumber: Data primer penelitian, diolah melalui NVivo Matrix Coding.

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kematangan administrasi usaha merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam kesiapan penerapan ABC. UMKM yang telah terbiasa mencatat biaya produksi memiliki dasar yang lebih memadai untuk mengembangkan pencatatan berbasis aktivitas. Sebaliknya, UMKM yang masih mencampurkan biaya usaha dan kebutuhan rumah tangga perlu memperbaiki pencatatan dasar terlebih dahulu.

Dengan demikian, penerapan ABC pada UMKM tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis akuntansi, tetapi juga dengan kebiasaan administrasi, kemampuan pencatatan, kompetensi pelaku usaha, dan ketersediaan data biaya. Oleh karena itu, penerapan ABC sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemisahan biaya usaha dan rumah tangga, pencatatan biaya produksi, identifikasi aktivitas, hingga penentuan cost driver.

Hambatan Penerapan ABC

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa hambatan penerapan Activity-Based Costing (ABC) terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, sistem pencatatan biaya, dan pemahaman akuntansi biaya. Beberapa tema yang ditemukan meliputi tidak tersedianya staf akuntansi, keterbatasan pemahaman mengenai alokasi biaya, serta kebutuhan pelatihan akuntansi biaya.

Tabel 7. Hambatan Penerapan ABC pada UMKM

Hambatan	Kondisi yang Ditemukan	Implikasi terhadap ABC
Keterbatasan SDM	Tidak tersedia staf khusus akuntansi	Pengelolaan biaya masih dilakukan oleh pemilik/pengelola
Pemahaman akuntansi biaya	Pemahaman alokasi biaya masih terbatas	Kesulitan mengelompokkan biaya berdasarkan aktivitas
Sistem pencatatan	Pencatatan biaya belum seluruhnya terstruktur	Data biaya belum siap digunakan untuk ABC
Identifikasi aktivitas	Belum terbiasa mengidentifikasi aktivitas produksi	Cost pool dan cost driver belum ditentukan
Pelatihan	Mebutuhkan pelatihan akuntansi biaya	Diperlukan pendampingan sebelum implementasi ABC

Sumber: Data primer penelitian dan hasil analisis tematik NVivo.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ABC pada UMKM tidak cukup dilakukan melalui pemberian formula perhitungan. Pelaku usaha perlu memahami hubungan antara aktivitas, konsumsi sumber daya, biaya, produk. Pemahaman tersebut penting agar biaya yang muncul dalam proses produksi dapat ditelusuri dan dialokasikan secara lebih tepat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan ABC dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga tahap berikut:

- Pencatatan biaya dasar
- Identifikasi aktivitas dan cost driver
- Perhitungan HPP berbasis aktivitas

Pendekatan bertahap tersebut lebih sesuai dengan kondisi UMKM karena memungkinkan perbaikan sistem biaya dimulai dari kemampuan yang telah dimiliki. Dengan demikian, penguatan pencatatan biaya dan kompetensi pelaku usaha menjadi prasyarat awal sebelum penerapan ABC secara lebih lengkap. Temuan ini juga memperkuat bahwa kesiapan ABC tidak hanya ditentukan oleh kompleksitas aktivitas produksi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan sistem informasi biaya yang tersedia.

Implikasi ABC terhadap Akurasi HPP dan Efisiensi Biaya

Secara konseptual, Activity-Based Costing (ABC) dapat meningkatkan akurasi HPP dengan mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas dan cost driver, bukan hanya berdasarkan volume produksi. Biaya ditelusuri dari sumber daya, aktivitas, produk, sehingga penggunaan sumber daya dapat dikaitkan dengan produk yang dihasilkan. Dalam konteks lima UMKM yang diteliti, pendekatan tersebut berpotensi membantu pelaku usaha mengidentifikasi aktivitas yang menggunakan sumber daya secara besar, seperti pengolahan, penggunaan mesin dan listrik, pengemasan, serta distribusi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas yang memberikan nilai tambah dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan pemborosan.

Tabel 8. Potensi Implikasi Penerapan ABC pada UMKM

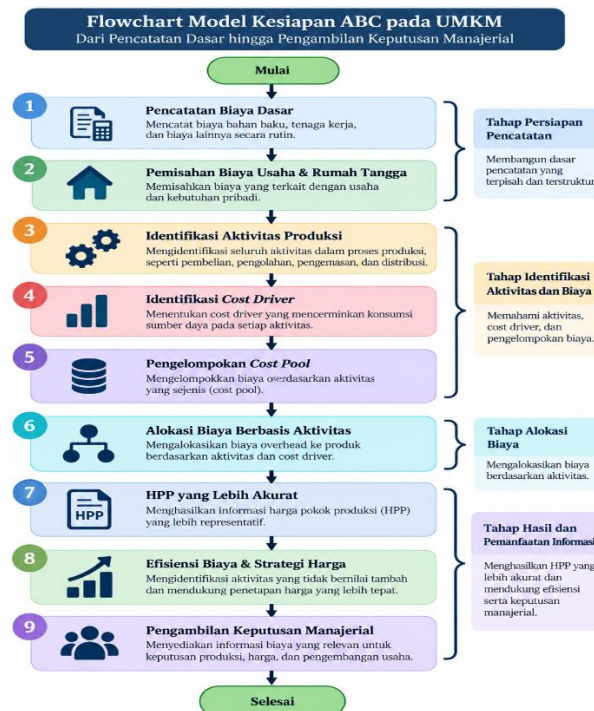
Aspek	Kondisi Saat Ini	Potensi Manfaat ABC
HPP	Pencatatan belum sepenuhnya berbasiskan aktivitas	HPP lebih terperinci
Biaya overhead	Belum seluruhnya ditelusuri berdasarkan aktivitas	Alokasi biaya lebih sesuai dengan konsumsi sumber daya
Pengendalian biaya	Informasi biaya masih terbatas	Identifikasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan pemborosan
Penetapan harga	Dipengaruhi biaya, pasar, dan pengalaman	Dasar informasi biaya lebih lengkap
Margin produk	Belum seluruhnya diketahui secara rinci	Evaluasi margin setiap produk
Keputusan manajerial	Mengandalkan informasi biaya yang tersedia	Mendukung keputusan produksi dan harga

Sumber: Data primer penelitian dan pengembangan analisis berdasarkan konsep ABC.

Dengan demikian, potensi manfaat ABC tidak hanya berkaitan dengan akurasi HPP, tetapi juga dapat mendukung pengendalian biaya, penetapan harga, evaluasi margin produk, dan pengambilan keputusan manajerial. Pendekatan ini menjadi relevan terutama ketika biaya overhead dan aktivitas produksi semakin beragam. Namun, temuan penelitian tidak menunjukkan adanya pengaruh kausal ABC terhadap efisiensi biaya, karena kelima UMKM belum menerapkan ABC. Oleh karena itu, implikasi ABC dalam penelitian ini diposisikan sebagai potensi dan kebutuhan penerapan. Untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh ABC terhadap efisiensi biaya, penelitian selanjutnya dapat melakukan implementasi ABC dan membandingkan HPP, margin, atau efisiensi biaya sebelum dan sesudah penerapan.

Model Konseptual Kesiapan ABC pada UMKM

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dirumuskan model konseptual sederhana:



Gambar 1. Model Konseptual Kesiapan Penerapan Activity-Based Costing (ABC) pada UMKM

Sumber: Diadaptasi dari Cooper dan Kaplan (1988); Kaplan dan Cooper (1998), serta dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan Matrix Coding NVivo Model tersebut sejalan dengan temuan penelitian bahwa sebagian UMKM masih membutuhkan perbaikan pencatatan sebelum dapat mengadopsi sistem ABC secara lebih lengkap. Penelitian juga merekomendasikan penggunaan pencatatan berbasis aktivitas sebagai tahap awal menuju penerapan ABC.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan biaya pada UMKM pengolahan makanan yang diteliti di Kota Bekasi masih memiliki tingkat kematangan yang beragam. Tiga UMKM, yaitu Tekwan Bu Yaya, Kue Lumpur Dzikra, dan Bakmi Ayam Favorit, masih menggunakan pencatatan biaya tradisional dan sederhana, sedangkan Kriuk Chicken dan Roti Lestari telah memiliki sistem pencatatan yang relatif lebih terstruktur.

Penelitian juga menemukan bahwa belum terdapat UMKM yang menerapkan Activity-Based Costing secara aktual. Penentuan harga masih dipengaruhi oleh biaya bahan baku,

pengalaman pemilik, harga pasar, daya beli konsumen, SOP franchise, serta perhitungan HPP sederhana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap sistem biaya berbasis aktivitas cukup terbuka, tetapi kesiapan administratif dan sumber daya manusia masih perlu diperkuat.

ABC memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas informasi HPP melalui identifikasi aktivitas dan cost driver yang lebih sesuai dengan konsumsi sumber daya. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi UMKM untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien, memperbaiki pengendalian biaya, mengevaluasi margin, serta menyusun strategi harga berdasarkan informasi biaya yang lebih sistematis.

Implikasi utama penelitian adalah bahwa adopsi ABC pada UMKM sebaiknya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah memperbaiki pencatatan biaya dan memisahkan biaya usaha dari biaya rumah tangga. Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi aktivitas produksi dan cost driver, kemudian mengembangkan perhitungan HPP berbasis aktivitas. Pelatihan akuntansi biaya dan penggunaan perangkat lunak akuntansi sederhana dapat menjadi pendukung proses tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa kesiapan penerapan ABC pada UMKM tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan akan akurasi HPP, tetapi juga oleh kesiapan pencatatan, kompetensi sumber daya manusia, karakteristik proses produksi, dan kemampuan administratif usaha. Penelitian selanjutnya dapat menguji model tersebut secara kuantitatif dengan melibatkan jumlah UMKM yang lebih besar serta mengukur perubahan HPP, efisiensi biaya, margin laba, dan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan ABC.

REFERENSI

1. Ahmad, K., Teng, N. W., & Zabri, S. M. (2017). The implementation of Activity-Based Costing in Malaysian small and medium-sized enterprises. *Journal of Computational and Theoretical Nanoscience*, 23(4), 3170–3173
2. Al-Dhubaibi, A. (2021). Activity-based costing implementation in healthcare sector. *Journal of Health Economics*.
3. Anggreini, A. F., Butarbutar, S. A., Arya, M., & Simbolon, P. (2024). Implementasi Activity-Based Costing sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi biaya di UMKM

-
- Tempe Kembar Jalan Pattimura Bawah, Pematangsiantar. *Jurnal Ekonomi USI*, 6(3), 83–91.
4. Azizah, N. (2023). Penerapan Activity-Based Costing pada UMKM makanan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
 5. Cooper, R., & Kaplan, R. S. (1988). Measure costs right: Make the right decisions. *Harvard Business Review*.
 6. Cooper, R., & Kaplan, R. S. (1991). Profit priorities from activity-based costing. *Harvard Business Review*.
 7. Cooper, R., & Kaplan, R. S. (1992). Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage. *Accounting Horizons*, 6(3), 1–13
 8. Damanik, Y. R., & Tarigan, V. (2024). Penentuan harga pokok produksi menggunakan metode Activity-Based Costing pada UMKM Basreng Emak Dyah di Pematangsiantar.
 9. Durana, P. (2019). Strategic cost management and Activity-Based Costing. *European Journal of Business Research*.
 10. Gunasekaran, A., Marri, H. B., & Grieve, R. J. (1999). Activity based costing in small and medium enterprises. *Computers & Industrial Engineering*, 37(1), 407–411. [https://doi.org/10.1016/S0360-8352\(99\)00105-9](https://doi.org/10.1016/S0360-8352(99)00105-9).
 11. Harmana, H. (2020). Activity-Based Costing sebagai sistem akuntansi biaya modern. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
 12. Horngren, C. T., & Sundem, G. L. (2005). *Introduction to management accounting* (13th ed.). Pearson Education.
 13. Jänkälä, S., & Silvola, H. (2012). Lagging effects of the use of activity-based costing on the financial performance of small firms. *Journal of Small Business Management*, 50(3), 498–523. <https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2012.00364.x>.
 14. Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1992). *Cost & effect: Using integrated cost systems to drive profitability and performance*. Harvard Business School Press.
 15. Kartika, A., Santoso, R., & Puspitasari, D. (2020). Implementasi Activity-Based Costing pada UMKM. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 15(2), 135–144.
 16. Kaukab, M. E. (2019). Implementasi Activity-Based Costing pada UMKM.

17. Mardhatilla, A. F., & Siregar, P. Y. (2025). Activity-Based Costing untuk efisiensi biaya UMKM. *Jurnal Akuntansi Bisnis*.
18. Mohammad, A., & Mohd Salleh, N. (2022). Managerial understanding of Activity-Based Costing. *Asian Journal of Accounting*.
19. Mubaroq, A. C., & Setyorini, C. T. (2024). Bibliometric analysis of Activity-Based Costing research. *Journal of Accounting Literature*.
20. Mulyadi. (2005). *Akuntansi biaya*. UPP STIM YKPN.
21. Ningsih, Y. N., & Hafni, D. A. (2023). Perbandingan Activity-Based Costing dan full costing pada UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
22. Nuryati, T., et al. (2023). Pengambilan keputusan berbasis biaya pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
23. N Pranoto, F., & Amiluddin. (2023/2024). Activity Based Costing System (ABC System) untuk penetapan Harga Pokok Produksi secara akurat produk UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
24. Priyatmo, A., & Akbar, R. (2019). Activity-Based Costing and effectiveness in SMEs. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
25. Putri, A., et al. (2021). Activity-Based Costing and marketing strategy in SMEs. *Jurnal Ekonomi Kreatif*.
26. Safitry, D., & Muntiah, S. (2022). Activity-Based Costing untuk efisiensi biaya UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
27. Sihombing, M. S., & Munthe, M. S. (2021). Implementasi Activity-Based Costing dalam penentuan harga pokok produksi pada UMKM Nasi Goreng 67 Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 55–63.
28. Silviandri, A., & Maharani, A. (2024). Penerapan Activity-Based Costing pada UMKM Nasi Goreng 67. *Jurnal Akuntansi UMKM*.
29. Suwardjono. (2005). *Teori akuntansi: Perekayasaan pelaporan keuangan (Edisi revisi)*. BPFE-Yogyakarta.

30. Syamsul. (2024). Investigasi pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM: Apakah disusun berdasarkan standar akuntansi? *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 14(1), 52–62.
<https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.5765>
31. Tandiono, R. (2024). The receptiveness puzzle: Understanding why small family businesses struggle with Activity-Based Costing adoption. *International Journal of Business and Society*, 25(1), 284–300.
32. Tahang, M., & Hakim, L. (2023). Activity-Based Costing untuk mengurangi aktivitas tidak bernilai tambah. *Jurnal Akuntansi Manajemen*.
33. Tsai, W. (1998). Activity-based costing and quality improvement. *Journal of Cost Management*.
34. Turnip, C. E., Ginting, F. A., Simbolon, B., Syahputra, R., & Purba, F. (2024). Penentuan harga pokok produksi menggunakan metode Activity-Based Costing pada UMKM Basreng Emak Dyah di Pematangsiantar. *Jurnal Ekonomi USI*, 6(3), 92–101.
35. Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. M. (2017). *Accounting* (26th ed.). Cengage Learning.